

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan Yunani dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 dirancang dan diimplementasikan guna mengatasi dampak krisis utang yang terjadi selama hampir satu dekade sebelumnya. Dengan memanfaatkan dua kerangka teori, yaitu teori kebijakan luar negeri dari K.J. Holsti dan teori interdependensi kompleks dari Robert Keohane dan Joseph Nye, penelitian ini menemukan bahwa pemulihan Yunani pasca-bailout bukan semata-mata hasil dari upaya internal, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi kebijakan domestik dan dinamika eksternal yang saling mempengaruhi.

Dari sisi internal, pemerintah Yunani meluncurkan serangkaian reformasi institusional dan kebijakan ekonomi struktural. Reformasi ini mencakup penyederhanaan sistem administrasi publik melalui program *Kleisthenis I*, penurunan tarif pajak penghasilan badan secara bertahap untuk menarik investasi asing, penguatan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menurunkan angka pengangguran muda, serta digitalisasi sektor kesehatan melalui ekspansi e-prescription dan sistem pencatatan medis elektronik. Reformasi ini memperlihatkan komitmen pemerintah dalam membangun kembali kapasitas negara dan memperkuat tata kelola ekonomi domestik.

Dari sisi eksternal, Yunani menunjukkan kemampuan beradaptasi dalam memanfaatkan peluang integrasi regional dan kerja sama internasional. Salah satu instrumen utama adalah pemanfaatan *Recovery and Resilience Facility (RRF)* melalui program nasional *Greece 2.0*, yang memfokuskan pada digitalisasi, transisi energi, dan reformasi sosial. Selain itu, Yunani juga mengoptimalkan dana kohesi dan *European Structural and Investment Funds (ESIF)*, serta menjalin kemitraan ekonomi strategis dengan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi di bidang energi dan infrastruktur. Kebijakan-kebijakan eksternal ini memperkuat posisi Yunani dalam tatanan ekonomi-politik kawasan dan memperlihatkan bagaimana negara kecil dapat memaksimalkan peluang dari keterkaitannya dengan aktor-aktor global.

Secara teoritis, kebijakan Yunani selama periode 2018-2022 mencerminkan perpaduan antara penyesuaian struktural yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi global dan upaya afirmatif untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi nasional. Dalam kerangka teori K.J. Holsti, kebijakan Yunani dapat dipahami sebagai bentuk *adaptasi strategis* dari negara yang tengah berada dalam kondisi krisis dan mengalami tekanan dari lembaga internasional seperti Uni Eropa dan IMF. Sementara itu, teori interdependensi kompleks menjelaskan bahwa meskipun Yunani berupaya mempertahankan otonomi,

Dinul Azizah 2025

KEBIJAKAN YUNANI DALAM MENGATASI KRISIS UTANG DI TAHUN 2018-2022

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repositry.upnvj.ac.id]

negara ini tetap berada dalam jaringan ketergantungan yang bersifat multidimensi, tidak hanya dalam sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, sosial, dan diplomatik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Yunani dalam mengelola krisis utang pada periode ini tidak hanya tergantung pada kebijakan ekonomi internal, tetapi juga pada kemampuan negara untuk merespons dinamika eksternal secara fleksibel dan strategis. Studi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan kebijakan yang bersifat multidimensional dan lintas sektoral, khususnya dalam konteks negara yang terintegrasi secara mendalam dalam sistem ekonomi global.

6.2 Saran Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan studi kebijakan luar negeri dan ekonomi politik internasional, khususnya dalam konteks negara-negara yang mengalami krisis dan berada dalam tekanan eksternal. Dengan menggabungkan teori kebijakan luar negeri K.J. Holsti yang berfokus pada peran aktor negara dan orientasi kebijakan, serta teori interdependensi kompleks dari Keohane dan Nye yang menyoroti keterkaitan dan saling ketergantungan antarnegara, studi ini membuktikan bahwa pendekatan teori tunggal seringkali tidak memadai dalam menjelaskan dinamika kebijakan negara-negara pasca-krisis.

Secara teoritis, studi ini menyarankan agar para peneliti selanjutnya mengembangkan pendekatan yang lebih interdisipliner dalam menganalisis kebijakan nasional. Misalnya, dengan menggabungkan teori hubungan internasional, ekonomi makro, tata kelola publik, dan studi integrasi regional untuk membentuk kerangka analisis yang lebih holistik. Pendekatan ini penting mengingat kebijakan ekonomi suatu negara terutama negara anggota Uni Eropa tidak dapat dilepaskan dari pengaruh struktur supranasional maupun pasar global.

Selain itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai kapasitas negara (*state capacity*) dalam merancang dan melaksanakan kebijakan di tengah keterbatasan kedaulatan fiskal. Pengalaman Yunani menunjukkan bahwa negara tetap dapat memainkan peran aktif dalam menyusun kebijakan yang bersifat progresif dan berkelanjutan, bahkan dalam konteks krisis dan pengawasan ketat dari lembaga internasional.

6.3 Saran Praktis

Dari sisi praktis, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian ini, baik untuk pemerintah Yunani, negara-negara berkembang yang menghadapi risiko krisis utang, maupun lembaga internasional.

1. Bagi pemerintah Yunani, penting untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi kebijakan reformasi yang telah dijalankan. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas birokrasi, memperluas inklusi sosial, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan luar negeri. Selain itu, reformasi fiskal harus terus diselaraskan dengan kebijakan pertumbuhan jangka panjang agar tidak hanya berfokus pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga menciptakan pemerataan kesejahteraan.
2. Pengalaman Yunani dapat menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain, terutama di kawasan Eropa Selatan, Afrika, dan Asia Tenggara, yang menghadapi tantangan serupa dalam hal defisit fiskal, ketergantungan pada bantuan luar negeri, dan tekanan utang publik. Negara-negara tersebut sebaiknya belajar dari pendekatan Yunani yang tidak hanya memotong belanja negara, tetapi juga berinvestasi dalam pembangunan kapasitas domestik melalui pendidikan, digitalisasi, dan reformasi administratif.
3. Bagi lembaga-lembaga internasional seperti Uni Eropa, IMF, dan Bank Dunia, penting untuk tidak hanya memberikan dukungan keuangan, tetapi juga ruang kebijakan (*policy space*) bagi negara penerima bantuan untuk merancang program-program nasional sesuai konteks lokal. Fleksibilitas kebijakan dan dukungan teknis yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat lokal akan lebih efektif dalam menciptakan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa pemulihan pasca-krisis hanya dapat dicapai jika reformasi kebijakan bersifat komprehensif, inklusif, dan disertai kemauan politik yang kuat. Yunani, dengan segala keterbatasannya, telah menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap kerja sama internasional tidak harus berarti kehilangan kedaulatan, tetapi justru dapat menjadi jalan untuk membangun ketahanan nasional yang baru.